

## PERANG DALAM MEDIA MASSA

Oleh : Zein Mufarrih Muktaf  
[zeinmuf@yahoo.co.id](mailto:zeinmuf@yahoo.co.id)  
twitter : zeinmuf, facebook : zeinmuf

### A. Latar Belakang

Seperti pada rangkaian kata mutiara

*“Kata-kata adalah gerilya, pasukan yang tak henti-hentinya menyerbu”*

(Mochtar Pabottinggi)

Kata-kata atau tulisan tak bedanya dengan senjata, ia tidak henti-hentinya menyerbu dan merasuk pada diri khalayaknya. Pada sebuah fenomena perang, posisi wartawan juga mempunyai peran penting atas menang kalahnya sebuah perang. Tengok saja sejarah Perang Vietnam, yang karena sikap wartawan Amerika yang tidak kompak dengan tentara serta negaranya, maka terjadilah demonstrasi anti Perang Vietnam di Amerika Serikat yang akhirnya menimbulkan krisis politik di negara tersebut (selain juga karena sebab yang lain, seperti efek perang antara Suria, Israel dan bangsa Arab, dan juga gerakan kesetaraan kulit hitam di Amerika Serikat dan gerakan kaum feminisi Amerika)(Cincotta.ed, 2004:355).

Media mempunyai andil yang sangat tinggi atas terjadinya demonstrasi besar-besaran anti Perang Vietnam pada waktu itu, hingga memunculkan generasi muda yang membawa budaya tandingan atas kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan bentuk dari protes kaum liberal muda yang protes terhadap perilaku budaya dominan setelah Perang Dunia II. Generasi ini sering dijuluki dengan *flower generation*, yang dimotori oleh Bob Dylan Jimmy Hendric, hingga Jhon Lennon. Dari krisis politik ini pulalah, penarikan besar-besaran tentara Amerika di Vietnam dilakukan, yang menjadikan Amerika kalah di Vietnam. Data menyebutkan Amerika mengalami kerugian sebesar \$ 15 Milyar dan telah mengorbankan putra bangsanya sebanyak 50-ribuan orang.

Pada masa tersebut, pihak Amerika tidak begitu sadar pentingnya posisi media pada perang Vietnam, yang konon merupakan perang paling tidak populer sepanjang sejarah Amerika Serikat dan merupakan perang terlama sepanjang sejarah Amerika

Serikat (dari tahun 1965-1973). Pada masa itu media dibiarkan bebas membuat angle beritanya, hingga akhirnya warga Amerika dipaksa menonton para anak-anak muda Amerika tewas di tanah orang asing. Media membawa kesadaran pada masyarakat Amerika bahwa perang tidak menguntungkan apa-apa kecuali hanya merugikan dari sisi kemanusiaan. Pada akhirnya belajar dari Perang Vietnam-lah Pemerintah Amerika mulai serius merawat media dalam mendukung misi perangnya di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan pada masa Perang Teluk I dan Perang Teluk II warga Amerika tidak melakukan protes massal atas kebijakan perang tersebut.

Pada masalah politik seperti ini media memang dihadapkan pada sebuah dilemma, mengapa? Karena pada posisi seperti ini media dihadapkan dengan pilihan yang sangat kontradiktif. Pertama, media diharapkan selalu pada koridor yang benar dan ideal sebagai pewarta, yakni menjadikan warta atau berita seimbang dan tidak memihak. Yang kedua adalah media diposisikan sebagai bagian dari bangsa, maka posisinya harus selalu mengutamakan kebangsaan, atau biasa disebut dengan jurnaslime patriotic. Ketiga, sebagai bagian dari industri, media dihadapkan dengan bagaimana membangun berita yang mampu menegaskan sebuah konflik agar perang menjadi bagian yang menarik untuk disimak. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah dilemma dalam institusi media. Apa yang dikatakan media sebagai *four estate* (pilar keempat) dalam demokrasi patut dipertanyakan lagi.

Indonesia sebagai negara yang multikultur, dengan macam agama, ratusan etnis serta ratusan bahasa memang cukup rawan terjadinya konflik. Peristiwa Sampit, Poso, hingga Ambon telah menjadi bukti bahwa konflik etnis dan agama menjadi keniscayaan di bangsa ini. Media sebagai bagian dari masyarakat menjadi sangat penting posisinya untuk membangun masyarakat yang damai. Media mempunyai andil sebagai bagian dari masyarakat yang mampu meredam akar konflik di bangsa yang majemuk ini. Namun sayangnya media seringkali menghadirkan sebuah konflik, bukan meredam konflik. Seperti kasus Bibit-Candra, media menciptakan sebuah bentuk narasi konflik dengan sebutan “Cicak vs Buaya”, atau dalam kasus “Si BuYa” sebuah kerbau dalam sebuah demonstrasi memprotes pemerintahan SBY, atau yang paling klasik adalah “TNI vs GAM”. Beberapa yang menjadi contohpun merupakan masalah politik yang besar, alih-

alih kita mengkritisi banyaknya berita criminal dalam media “kuning”, yang jelas-jelas memprioritaskan konflik sebagai sajian utama.

Hal ini haruslah menjadi bagian yang perlu dikritisi kembali. Bagaimana seharusnya sebuah media memposisikan dirinya. Memperjuangkan idealisme masyarakat, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya, dan selalu memprioritaskan pada bentuk jurnalisme yang berorientasi humanisme atau yang biasa kita sebut sebagai jurnalisme damai.

## **B. Pembahasan**

Globalisasi merupakan titik utama dalam konteks komodifikasi pemberitaan, ikut serta dalam membentuk opini masyarakat dari tingkat terkecil masyarakat hingga pemangku kebijakan negara. Globalisasi mengacu pada perluasan dan menguatkan arus perdagangan, modal, teknologi dan informasi internasional dalam sebuah pasar global tunggal yang menyatu (Petras dan Veltmeyer, 2002:7). Dalam hal ini UNDP dalam maklumatnya pada tahun 1992 menegaskan bahwa globalisasi meliputi liberalisasi pasar global dan pasar nasional dengan asumsi bahwa arus perdagangan bebas, modal dan informasi akan menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran manusia (Petras dan Veltmeyer, 2002:8). Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa teknologi dan informasi dalam konteks globalisasi adalah bentuk dari sebuah kompetisi, dan dengan terang-terangan bahwa informasi adalah bentuk dari komodifikasi, komodifikasi sendiri adalah perubahan dari nilai guna menjadi nilai tukar (Mosco, 1998: 141). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Vincent Mosco dalam tulisannya bahwa kompetisi media dalam artian modal yang merujuk pada penanaman ideologis dikatakan sebagai politik ekonomi media, Karena sifatnya yang komersil dan capital, maka oleh Vincent Mosco dianggap sebagai bentuk dari ekonomi politik media. Ekonomi politik media sendiri adalah relasi sosial, khususnya kekuasaan relasi, dan dengan silih berganti membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya (Mosco, 1998: 25).

Kasus Sri Mulyani dari skandal Bank Century hingga diangkatnya Sri Mulyani sebagai kepala Word Bank urusan Amerika Latin dan Afrika bisa menjadi contoh, bagaimana media kita secara khusus memperlihatkan sikap ideologisnya. Ambil contoh bagaimana TVONE diawal yang memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Sri Mulyani sebagai personal. TVONE mem *frame* sosok Sri Mulyani sebagai bagian dari parasit

birokrasi negara, sebagai biang dari masalah selama ini dalam sistem ekonomi Indonesia. Pembingkaiannya jelas, kepentingan modal dibalik TVONE mempunyai andil mengkonstruksi masalah Century. Lihat saja bagaimana aksi demo menentang Sri Mulyani dan Budiono diperlihatkan dalam atmosfer konflik, seperti gambar Sri Mulyani dalam konotasi drakula, Sri Mulyani dengan kepala bertanduk yang mengkonotasikan sosok setan. Sri Mulyani dalam bingkainya memperlihatkan bagaimana sosok penjahat diperlakukan. Konflik dalam perspektif jurnalisme adalah fakta dimana interaksi dua belah pihak yang berbeda kepentingan dalam ruang sosial. Dinamika konflik pada dasarnya adalah upaya satu pihak mengalahkan dan menghancurkan pihak lawan (Ashadi, 2006:125).

Tidak hanya selesai ditataran itu, dalam acara *talk show*-nya, TVONE juga sering membenturkan narasumber yang ada murni hanya untuk mempertegas suasana konflik yang sesungguhnya. Selebihnya TVONE tetap memakai fakta media, bukan fakta empiris nara sumber. Disinilah seringkali media massa komersil tidak peduli dengan bagaimana narasumber melakukan klarifikasi, namun lebih sebagai bagian dari media mengkonstruksi sebuah masalah.

Begitu juga dengan METROTV dalam mengemas kasus Sri Mulyani Budiono dalam kasus Century dan atau dalam pengangkatan Sri Mulyani sebagai pejabat tinggi World Bank. Hutang sejarah konflik antara dua konglomerat serta juragan media di Indonesia Aburizal Bakrie dan Surya Paloh juga mencampuri bingkai berita yang diangkat dua belah pihak media tersebut. sekali lagi fakta medialah yang dikedepankan, daripada fakta empiris yang bersumber pada narasumber. Dalam pemberitaan pembentukan Sekretariat Bersama partai koalisi yang diangkat kemudian Aburizal Bakrie sebagai ketua harian membuat keperpihakan dalam pemberitaan METROTV semakin terlihat. Seperti sebuah headline di program *Metro Hari Ini* dengan judul “*Akal-akalan Golkar*” membuat semacam konstruksi bahwa apa yang dibentuk dengan sebutan Sekretaris Bersama Partai Koalisi yang kebetulan diketuai langsung oleh Aburizal Bakrie sebagai intrik Aburizal Bakrie sendiri untuk melepaskan diri dari kejaran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam masalah pajak.

Media yang berkonflik ini sesungguhnya merugikan masyarakat sebagai pelaku media. Masyarakat dibentuk opininya agar sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan

korporat media. Dan dalam permasalahan seperti di atas, sepertinya media yang bersinggungan sudah tidak mengikuti kaedah praduga tak bersalah (PTB), apalagi yang menyangkut kasus hukum seperti kasus Century, Bibit Candra, dan Kasus Susno Duaji.

Media menjadi cenderung rancu dan amatiran saat mengelola masalah hukum. Yang sering terjadi media menjadikan hukum sebagai bagian dari komodifikasi, yakni melakukan intervensi, membangun konflik, hingga kemudian membangun statement sendiri dari media itu sendiri. Dalam realisasinya, sesungguhnya media harus tetap memakai fakta empiris sebagai fakta utama, apalagi menyangkut masalah hukum. Seringkali kita melihat dalam *talk show* di televisi, terutama di METROTV dan TVONE, jaksa dan pengacara dikonflikkan, dan ujung-ujungnya presenter atau moderator tanpa sedikitpun melakukan klarifikasi atau menyimpulkan dengan baik fakta yang telah diulas. Sekali lagi media massa telah melahirkan jurnalisme yang berorientasi konflik.

Menurut Ashadi Siregar, fakta dapat dilihat dari metode jurnalisme dalam merekonstruksi. *Pertama*, jurnalis berlindung pada kredibilitas narasumber, dan yang *kedua*, fakta ditampilkan tanpa narasumber, yang kemudian memakai atau mengandalkan kredibilitas media itu sendiri (Siregar, 2006: 121). Dari keduanya tersebut di atas, kita bisa melihat apakah sebuah media dalam melihat praduga tak bersalah cenderung memakai pandangan media itu sendiri mewakili ideology medianya, atau sebaliknya cenderung mewakili rakyat dengan memakai narasumber sebagai fakta. Namun yang terjadi sekarang ini media memang memakai narasumber, namun narasumber ditempatkan sebagai bagian yang tengah berkonflik, dan tetap kesimpulan akan dibangun sendiri oleh media sesuai dengan ideology dan kepentingannya. Menurut kaum konstruksionis, realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda (Herbert, 1992:191 dalam Eriyanto, 2002:19).

Vincent Mosco dalam bukunya *The Political Economy of Communication*, bahwa ekonomi politik media berpijak pada relasi sosial ekonomi politik, yang mana secara tidak langsung mendukung satu sama lain. Relasi tersebut yakni relasi kekuasaan, baik produksi, distribusi ataupun konsumsi (Mosco:1996). Dominasi kapitalisme dan

dominasi dunia maju juga sangat berperan dalam proses hegemoni. Menurut Eli Abel (1994), lalu lintas informasi dunia dikuasai oleh Barat. Agen-agen berita seperti *UPI*, berpusat di New York, *Reuters* berpusat di London. *Agence France Presse* (AFP) yang berpusat di Paris kini mengendalikan pertukaran berita-berita internasional, termasuk ke negara-negara Muslim. Sementara Jepang dan Jerman, lewat agen berita *Kyodo News Agencies* dan *Deutsche Presse Agentur*, nyaris menjadi agen dunia. Agen berita *Assosiated Press* (AP), misalnya lebih dari satu milyar orang memperoleh akses informasi yang diperoleh dari berita-berita AP (Dedy Djamaludin Malik, 1997:44).

Kekuatan media Barat juga memberi andil membangun sekat konflik masyarakat dunia. Industri media sekitar 80 % dikuasai bangsa Barat, yang notabeneanya adalah negara digdaya dengan sebutan negara maju. Dari sini kita bisa melihat bagaimana frame atau bingkai pemberitaan yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap realita dunia. Edward W. Said dalam bukunya *Covering Islam* menjelaskan dengan mengambil contoh konstruksi dan penanaman ideology tentang penyanderaan warga Amerika tahun 1979 di kedutaan Amerika Serikat di Iran oleh para mahasiswa Iran. Mengutip dari Edward W Said (Said, 2002:81), ia mencoba menganalisis teks media yang ditulis oleh Flora Lewis dalam *New York Times* tanggal 28-30 desember 1979. Said menyimpulkan bahwa apa yang ditulis Lewis mensiratkan antagonisme terhadap dunia “kita”. Membangun konflik antara *angel and demon*, memperlihatkan bahwa Islam dianggap sebagai bagian yang buruk, dan “menentang kita” yang dalam definisi Louis Althusser dinamakan sebagai *Ideologi State Aparatus*, yakni melihat bahwa ideologi tidak berhubungan langsung dengan realita, namun mengimplikasikan pada realita. Sebuah konstruksi akan tafsir untuk mengungkapkan realitas dunia di balik representasi dunia itu (ideologi yang berarti ilusi atau kiasan) (Althusser, 2005: 39). Lewis menulis bukan hanya berkuat pada permasalahan penyanderaan, namun juga merembet pada perilaku bangsa Arab dan Islam yang totaliter anti demokrasi, dan penggambaran keimanan yang abnormal.

Dari tulisan Lewis Said menyimpulkan bahwa tulisan Lewis menyiratkan tentang konflik antara Islam dan Amerika atau dalam gaya yang lain, komunis versus Amerika. Apa yang dilakukan oleh Lewis digambarkan oleh Ashadi sebagai pemberitaan yang mengacu pada kredibilitas media, dan tidak mengacu pada narasumber. Selain itu Lewis dalam kasus ini memposisikan diri sebagai eksternalisasi, melihat kasus dari

kacamata luar, dan tidak melakukan internaslisasi (Eriyanto, 2002:18). Apa yang dilakukan oleh Lewis hanya melakukan sebuah penafsiran. Konsentrasi media massa yang kuat dapat dikatakan membentuk inti komunal penafsiran yang menyediakan suatu penggambaran tentang Islam, dan tentu saja merefleksikan kepentingan yang kuat dalam masyarakat yang dilayani oleh media (Said, 2002:59). Dari apa yang dianalisis oleh Edward W Said dalam bukunya memperlihatkan Media Barat secara jelas mengutamakan konflik sebagai sajian beritanya. Hal ini lebih pada penguatan ideology dan globalisasi itu sendiri.

Setelah Perang Vietnam, Amerika Serikat berusaha memperkuat pilar keempat demokrasi ini (media) menjadi bagian yang kuat bersama negara. Media Barat seperti yang telah diulas di atas telah membentuk konflik itu untuk membentuk permusuhan dengan dunia komunis Uni Sovyet dan Islam. Selain itu perang yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya sekali lagi mempertegas bagaimana pemberitaan pada tingkat global sarat akan konflik.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa industri media, terlebih penyiaran memang dari isi siaran sekat antara fakta dan fiksi sangatlah tipis. Masyarakat sering disuguhkan fakta dalam suguhan fiksi, dan begitu sebaliknya. Maka entertainment menjadi yang utama dalam penyiaran. Berita pun mau tidak mau juga harus mengandung sisi entertainment, baru kemudian diharapkan mampu memenuhi fungsi penyadaran akan kenyataan (*surveillance*), atau lebih jauh, mengharapkan penyadaran akan adab sosial (*civility*) (Ashadi, 2006:122). Jurnalisme konvensional menjadikan konflik sebagai tumpuan nilai berita. Memperlihatkan konflik yang disuguhkan oleh televisi kita, layaknya sinetron atau drama reality show, konflik dalam jurnalisme sudah menjadi makanan keseharian kita saat menonton televisi.

Idealnya jurnalisme haruslah bersifat objektif, namun memang sedikit naif jika mengharapkan media harus bersifat objektif. Namun sebagai apa yang kita sebut media adalah pilar keempat demokrasi maka seharusnya media mempunyai batas-batas etika dalam melakukan tugas jurnalismenya. Nilai-nilai objektifitas dan nilai-nilai etika inilah yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai asas ketidakperpihakan (*impartiality*) yang mengandung aspek keseimbangan dan netralitas (Ashadi, 2006:125). Namun disisi lain ada sebuah tembok yang besar yang menghalangi terwujudnya

idealisme itu, yakni globalisasi dan apparatus ideology. Kantor berita dan industri berita yang didominasi Barat jelas membawa ideology dengan memakai kendaraan globalisasi. Jelas hal tersebut lebih dari sebuah kepentingan atas keperpihakan, yakni keseluruhan bentuk pengendalian ekonomi, budaya, hingga politik. Ideologi dalam globalisasi adalah seperangkat kepercayaan, pandangan, ide yang menentukan kepercayaan alamiah yang dianugerahkan kepada masyarakat. hal tersebut adalah peran yang membenarkan penentuan terhadap politik, sistem ekonomi dan membuat masyarakat setuju bahwa hanya itu yang terlegitimasi, pantas, dan mungkin (Gelinas, 2003:22-23). Selain itu globalisasi juga menegaskan sebagai alat dari neoliberalisme, yakni kepercayaan akan kepemilikan diri, percaya akan hukum pasar, dan percaya akan perusahaan dan perdagangan (Gelias, 2003:24). dari sini kita bisa melihat bahwa keobjektifitasan akan jurnalisme akan berhadapan dengan kapitalisme, pemilik modal, dan kepentingan ideology yang mendukung dibalik itu. Maka jika kita kaitkan pada tingkat global, maka jurnalisme akan selalu bertemu dengan jurnalisme konflik.

Etika dalam jurnalisme sangatlah penting. Etika dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti adapt istiadat atau kebiasaan baik. Menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yaitu;

- Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika.
- Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia.

(Teguh, 2006: 3)

Etika mempunyai banyak definisi, *pertama* nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan moral bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang disebut sebagai kode etik. *Ketiga*, dapat berarti pula sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hal yang baik dan buruk pada masyarakat (Fajar, 2007:111).

Etika dalam pemberitaan sangatlah penting, apalagi menyangkut bangsa Indonesia yang rawan akan konflik horisontal. Bangsa yang majemuk ini haruslah dijaga dengan baik, yang salah satunya dengan membangun media massa yang beretika. Sudah



waktunya industri media benar-benar menerapkan apa yang dinamakan sebagai *peace journalism*. *Peace journalism* atau jurnalisme damai adalah sebuah bentuk padangan yang melihat kebenaran bukan dari oknum yang berlawanan atau berkonflik, namun siapa yang menghargai kehidupan kemanusiaan, yang utama bukan pihak yang berkonflik namun tentang siapa yang menjadi korban dalam konflik atau perang tersebut (Ashadi, 2006: 128). Maka konflik horisontal yang dikarenakan kemajemukan bangsa, hanya bisa dihadapi dengan media massa yang berperikemanusiaan. Maka jurnalisme damai penting adanya untuk mengawal bangsa ini menuju bangsa yang beradab dan berdemokrasi seutuhnya.

#### **D. Kesimpulan**

Seperti yang telah diulas di atas, industri media massa yang kita tonton, dengar ataupun baca masih memperlihatkan unsur realitas konflik. Memang tak dapat dipungkiri bahwa sebagai industri media massa agar tetap eksis maka kebutuhan akan iklan dan banyaknya penonton menjadi utama. Dan penonton kita masih menyukai dengan realitas konflik pada layar televisi mereka. Apa yang dinamakan sekat fiksi dan fakta menjadi tipis, maka mau tidak mau unsur konflik menjadi yang utama dalam media massa kita. Jika hal ini diteruskan maka bangsa yang majemuk ini juga akan tenggelam oleh konflik tanpa henti, dan media massa bisa menjadi biang dari segalanya itu.

Maka etika jurnalisme sangatlah penting digunakan, sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap media massa, begitu juga sebaliknya media massa mengontrol masyarakat. Selain itu, media massa juga mempunyai tanggung jawab sosial mengemban pilar keempat demokrasi, yang mana salah satunya selalu mengedepankan kepentingan umum dan kemanusiaan.

#### **Daftar Pustaka**

Cinotta, Howard ., *ed.*, (2004), *Sejarah Amerika*, New York, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Petras, James dan Veltmeyer, Henry, (2002), *Imperialisme abad 21*, Yogyakarta, Kreasi Wacana

Mosco, Vincent,(1998) *The Political Economy of Communication*, London, SAGE.

Ashadi Siregar, (2006), *Etika Komunikasi*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka.

Eriyanto, (2002), *Analisis Framing*, Yogyakarta, LKiS.

Althusser, Louis, (2005), *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Yogyakarta, Jala Sutra.

Gelinas, Jacques B, (2003), *Juggernaut Politics*, London dan New York, Zed Books.

Teguh Wahyono, (2006), *Etika Komputer*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.

Fajar Junaedi, (2007), *Pengantar Komunikasi Massa*, Yogyakarta, Santusta